

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT IZIN  
PENANGKAPAN IKAN (SIPI) DI JAWA TENGAH**

Oleh :

Nurul Fauziah, Kismartini

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah banyak menuai berbagai permasalahan sehingga menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah, menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, kemudian berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Tengah masih terdapat ketidaksesuaian seperti halnya waktu dan biaya dalam pelaksanaan penerbitan izin tersebut. Hal ini terjadi karena kultur dari masyarakat nelayan sendiri yang sulit untuk memahami persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI, adanya peran jasa perizinan atau calo, terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, dan kurangnya SDM dalam pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Tengah. Berdasarkan kekurangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir permasalahan mulai dari, melakukan pendekatan emosional dengan cara melakukan komunikasi secara langsung untuk merubah kultur dan paradigma masyarakat nelayan dalam memberikan pemahaman terkait pelaksanaan penerbitan SIPI, evaluasi terhadap terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, pengawasan yang ketat terhadap peran calo, perlu penambahan SDM, dan penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci: Penerbitan, Surat Izin, Penangkapan Ikan, Implementasi**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan yang terjadi di berbagai bidang menuntut pemerintah untuk siap dalam melayani berbagai pelayanan publik. Tuntutan pelayanan publik di berbagai bidang yang semakin kompleks mendorong pemerintah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya.

Segala aspek pembangun daerah yang diatur dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan Provinsi salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan mencakup beberapa urusan wajib diantaranya perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengendalian lingkungan hidup, dan pelayanan

administrasi. Sektor kelautan dan perikanan kini mulai mendapatkan perhatian khusus dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan.

Pengawasan yang tegas pada sektor kelautan dan perikanan menjadi topik yang hangat diperbincangkan saat ini. Perizinan usaha perikanan mulai semakin diperhatikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 mulai diperhatikan. Berbagai perizinan usaha perikanan mendapatkan pengawasan yang ketat.

Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai peran sebagai pelaksana penerbitan izin usaha perikanan baik itu SIUP, SIPI, maupun SIKPI dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan menfokuskan pada penerbitan SIPI yang begitu sering dilakukan oleh setiap pelaku usaha penangkapan ikan.

Proses implementasi kebijakan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah ternyata belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Masih ditemukan ketidaksesuaian baik waktu maupun

biaya penerbitan SIPI di Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pada Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah?
3. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam Kebijakan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap (SIPI) di Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi

Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah.

3. Merumuskan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah.

## **D. Kerangka Teori**

Merrile Grindle dalam Leo Agustino (2014:139) menyebutkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang menyangkut 3 hal penting yaitu, atas dasar adanya tujuan dan sasaran kebijakan; adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau

sasaran kebijakan; dan adanya hasil dari suatu kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari suatu kebijakan. Model Implementasi Merilee S. Grindle merupakan model dengan pendekatan *top-down*, dimana menurut Grindle ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (Agustino, 2012:154). Dua faktor tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat pada implementasi kebijakan. Kedua faktor tersebut adalah faktor isi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan.

Faktor isi kebijakan terdiri dari:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, menjelaskan bahwa jenis kebijakan publik

yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan, merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat atau *target group*, disini menjelaskan apakah manfaat yang diterima oleh masyarakat telah sesuai dengan kebutuhannya atau justru manfaat yang diterima tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

3. Derajat perubahan yang diinginkan, merupakan sejauh mana perubahan yang dirasa didapat dari suatu kebijakan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan, menjelaskan mengenai ketepatan suatu kebijakan yang diimplementasikan ini apakah sudah tepat dengan lokasi dan apakah kebutuhan sudah menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat.

5. Siapa pelaksana kebijakan. Dalam suatu kebijakan harus tepat dalam memilih implementor. Implementor haruslah memiliki

kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, serta penyebutan implementor harus dijelaskan secara rinci.

6. Sumber daya yang dikerahkan. Implementasi sebuah kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksud bukan hanya sumber daya manusia tetapi juga sumber daya finansial.

Faktor lingkungan kebijakan terdiri dari:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Menjelaskan bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa, menjelaskan bahwa lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan itu sendiri. Strategi penyelesaian konflik secara tidak langsung menilai ciri-ciri dari lingkungan dimana

kebijakan tersebut diimplementasikan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap. Daya tanggap yang cukup akan memudahkan implementor dalam memperoleh informasi untuk mengevaluasi capaian kebijakan dan mendapat dukungan dari masyarakat bagi keberhasilan suatu implementasi. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah yang dilihat dari proses implementasi sebagai berikut:

1. Persyaratan penerbitan SIPI
2. Prosedur pelayanan penerbitan SIPI
3. Jaminan pelayanan penerbitan SIPI

Proses implementasi kebijakan tersebut akan menghasilkan kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Jenis manfaat yang dihasilkan: a) kesesuaian antara manfaat yang diterima nelayan dengan kebutuhannya.
2. Derajat perubahan yang diinginkan: a) tujuan kebijakan pelayanan penerbitan SIPI; b) perilaku masyarakat nelayan.
3. Pelaksana kebijakan: a) kompetensi dan komitmen pelaksana pelayanan penerbitan SIPI; b) sikap dukungan pelaksana pelayanan penerbitan SIPI.
4. Sumber daya yang dikerahkan: a) SDM; b) dana; c) fasilitas.
5. Karakteristik lembaga dan penguasa: a) strategi DKP Provinsi Jawa Tengah dan UPT. PTSP dalam penyelesaian masalah.
6. Kepatuhan dan daya tanggap: a) kepatuhan dan ketaatan DKP Provinsi Jawa Tengah dan UPT. PTSP; b) daya tanggap DKP Provinsi Jawa Tengah dan UPT. PTSP.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokus penelitian pada Provinsi Jawa Tengah dengan sumber informan DKP Provinsi Jawa Tengah, UPT. PTSP, dan masyarakat yang terlibat dalam penerbitan SIPI. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti kemudian dilakukan teknik snowball karena penulis ingin menjelajahi objek penelitian sampai tidak ditemukan lagi informasi baru, dan juga teknik incidental karena mengikuti situasi di lapangan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yaitu Permen KP No. 30 Tahun 2012, Perda Jateng No. 10 Tahun 2014, Pergub Jateng No. 22 Tahun 2015, dan SOP Penerbitan SIPI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumen-dokumen dari penerbitan SIPI. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

reduksi data, penyajian data dan verifikasi/ penyimpulan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan akan menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dan faktor pendukung serta penghambat implementasi sehingga dapat dirumuskan upaya yang perlu dilakukan agar kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### **A. Implementasi Kebijakan Penerbitan SIPI di Jawa Tengah**

Implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dipaparkan melalui hal yang terkait proses implementasi sebagai berikut:

#### **1. Kejelasan persyaratan penerbitan SIPI**

Persyaratan penerbitan SIPI sebenarnya telah diatur dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 dan sudah dilakukan sosialisasi melalui brosur, stand banner, dan sosialisasi ketika ada pertemuan. Pada

pelaksanaanya, persyaratan penerbitan SIPI belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat nelayan. Hal tersebut terjadi karena nelayan sendiri yang tidak mau tahu adanya administrasi seperti dan bahkan banyak dari mereka yang buta huruf.

#### **2. Kejelasan prosedur pelayanan penerbitan SIPI**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penerbitan SIPI sudah diatur baik oleh DKP Provinsi Jateng maupun oleh UPT. PTSP, namun masih banyak yang mengeluhkan bahwa prosedur berbelit. Hal tersebut memang karena untuk memenuhi semua dokumen persyaratan perlu dilakukan pada beberapa tempat yang berbeda.

#### **3. Dasar hukum pelayanan penerbitan SIPI**

Penerbitan SIPI di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada dua regulasi yaitu: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014.

#### **4. Waktu dan biaya pelayanan penerbitan SIPI**

Waktu pada pelayanan penerbitan SIPI telah diatur dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 dan SOP pada penerbitan SIPI yang dilaksanakan oleh UPT.PTSP, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian waktu dan terkadang melebihi waktu dari aturan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan biaya penerbitan SIPI, untuk biaya penerbitan SIPI telah diatur dalam Perda Jateng No. 10 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaannya di lapangan juga masih terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut yang terjadi pada waktu dan biaya penerbitan SIPI dikarenakan nelayan dan/atau pemilik kapal tidak mengurus sendiri perizinan SIPI tersebut dan mereka memilih menggunakan jasa perizinan atau calo.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yaitu:

1. Kesesuaian antara manfaat yang diterima nelayan dengan kebutuhannya

Manfaat yang diterima nelayan belum sepenuhnya dirasakan karena nelayan dan/atau pemilik kapal masih mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan SIPI. Tak hanya itu ditambah dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 juga menyulitkan nelayan dan/atau pemilik kapal. Terbitnya Undang-Undang tersebut juga menyulitkan petugas pelaksana penerbitan SIPI karena terjadinya penambahan jumlah kapal.

2. Tujuan kebijakan pelayanan penerbitan SIPI

Tujuan dari kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah sebenarnya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan di Jawa Tengah. Realitas yang terjadi adalah penerbitan SIPI di Jawa Tengah terkadang membutuhkan waktu yang lama, hal tersebut disebabkan baik dari nelayan dan/atau pemilik kapal sendiri maupun petugas pelaksana sendiri. Ditambah dengan terbitnya kebijakan-kebijakan baru

juga sempat terjadi pemberhentian sementara pada penerbitan SIPI.

### 3. Perilaku masyarakat nelayan

Masyarakat nelayan dengan kultur dan pemikiran yang berbeda terkadang sulit bagi mereka untuk memahami hal-hal terkait penerbitan SIPI. Mereka yang tidak mau terlibat dengan administrasi dan selalu beranggapan berbelit dalam mengurus penerbitan SIPI. Walaupun seperti itu, sebagian dari mereka masih merasa senang pada pelayanan penerbitan SIPI yang dilaksanakan oleh UPT.PTSP. Sayangnya, terbitnya kebijakan-kebijakan baru seperti pelarangan cantrang mereka masih sulit memahami maksud dari kebijakan tersebut bahkan sempat terjadi aksi dan perilaku mereka semakin tertutup. Ditambah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 membuat mereka semakin malas dalam mengurus perizinan SIPI.

### 4. Kompetensi dan komitmen pelaksana pelayanan penerbitan SIPI

Pelaksana pelayanan penerbitan SIPI telah memiliki kualifikasi kompetensi bagi pelaksana

pelayanan penerbitan SIPI, baik oleh DKP Provinsi Jateng yaitu syarat petugas cek fisik kapal harus sudah mempunyai brevet. Begitu juga dengan UPT. PTSP, PTSP juga mempunyai kualifikasi kompetensi sendiri bagi para pelaksana pelayanan. Untuk komitmen baik DKP maupun PTSP telah berkomitmen karena sekarang memang telah transparansi dan berbasis IT.

### 5. Sikap dukungan pelaksana pelayanan penerbitan SIPI

Sikap pelaksana pelayanan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dapat dinilai cukup mendukung. Hal tersebut terlihat dari usaha pelaksana yang selalu berusaha untuk menciptakan inovasi baru dalam pelayanan penerbitan SIPI.

### 6. SDM

Keberhasilan pelaksanaan penerbitan SIPI dipengaruhi oleh SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas SDM pada pelaksana penerbitan SIPI dapat dilihat dari kompetensi dan komitmen dari pelaksana tersebut. Tak hanya segi kualitas, kuantitas dari pelaksana penerbitan SIPI juga

merupakan hal yang penting. Jumlah pelaksana penerbitan SIPI masih dirasa kurang. Hal tersebut dirasakan baik oleh petugas teknis di lapangan yaitu petugas cek fisik kapal maupun petugas pelayanan administrasi.

#### 7. Dana

Dana sebagai penentu keberhasilan kebijakan penerbitan SIPI bersumber dari biaya retribusi perizinan SIPI dan pemerintah. Dana yang disediakan masih dirasa kurang oleh petugas teknis di lapangan karena mereka sering manggantinya dengan uang pribadi seperti akomodasi, dan lain-lain.

#### 8. Fasilitas

Fasilitas yang berasal dari sumber dana yang tersedia dialokasikan untuk penambahan gerai-gerai pelayanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan dan pembangun TPI, dan lain sebagainya.

#### 9. Strategi DKP Prov. Jawa Tengah dan UPT.PTSP dalam penyelesaian masalah

Strategi DKP Prov. Jawa Tengah dan UPT.PTSP dalam menyelesaikan masalah adalah dengan melakukan tiga hal yaitu komunikasi, diskusi, dan sosialisasi.

#### 10. Kepatuhan dan ketaatan DKP Prov. Jawa Tengah dan UPT.PTSP

Kepatuhan dan ketaatan DKP Prov. Jawa Tengah dan UPT.PTSP dapat dinilai cukup bagus karena saat ini pelayanan penerbitan SIPI lebih transparansi karena berbasis IT, selain itu juga mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan.

#### 11. Daya tanggap DKP Prov. Jawa Tengah dan UPT.PTSP

Daya tanggap dari petugas pelaksana penerbitan SIPI terkadang masih terdapat kendala, walaupun selama ini petugas pelaksana telah menanggapi dengan semaksimal mungkin, namun pelaksana penerbitan SIPI tetap akan terus mengevaluasi dan memperbaikinya.

### **C. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di Jawa Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian dari implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah masih terdapat beberapa kendala, namun pemerintah sebagai pelaksana penerbitan SIPI terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadi permasalahan

pada pelaksanaan penerbitan SIPI. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu:

- a) Membuat *barcode* pada Kapal yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi;
- b) Membuat *barcode* pada Surat Izin SIPI;
- c) Mulai membuka gerai-gerai pelayanan perizinan SIPI di setiap daerah;
- d) Terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah; dan
- e) Sosialisasi hal-hal terkait penerbitan SIPI di Jawa Tengah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pelaksana penerbitan SIPI belum maksimal karena masih tahap percobaan, namun akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

di Jawa Tengah belum berjalan efektif dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Persyaratan dan prosedur pelayanan penerbitan SIPI di Jawa Tengah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat nelayan.
- b) Pelaksanaan pelayanan penerbitan SIPI di Jawa Tengah telah diatur dalam Permen KP No. 30 Tahun 2012 dan Perda Jateng No. 10 Tahun 2014.
- c) Pada kenyataannya di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian pada waktu dan biaya pelayanan penerbitan SIPI.
- d) Dalam pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Tengah juga masih terdapat peran aktif dari jasa perizinan atau calo.

#### **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Manfaat dan tujuan pelaksanaan pelayanan penerbitan SIPI di Jawa Tengah belum dirasakan

sepenuhnya oleh masyarakat nelayan.

- b) Terdapat tanggapan positif dan negatif dari perilaku masyarakat nelayan dalam menanggapi seluruh aturan yang ada terkait penerbitan SIPI di Jawa Tengah.
- c) DKP Provinsi Jawa Tengah dan UPT PTSP Jawa Tengah telah mempunyai kompetensi tersendiri bagi pelaksana pelayanan penerbitan SIPI, selain itu keduanya telah berkomitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- d) Sikap pelaksana kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah dapat dinilai cukup mendukung, hanya saja jumlah SDM dalam pelaksanaan pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah dirasa kurang.

### **3. Upaya-Upaya Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah perlu dilakukan upaya-upaya agar implementasi dapat berjalan

dengan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a) Membuat *barcode* pada Kapal yang dikeluarkan oleh DKP Provinsi
- b) Membuat *barcode* pada Surat Izin SIPI;
- c) Mulai membuka gerai-gerai pelayanan perizinan SIPI di setiap daerah;
- d) Terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan perizinan SIPI di Jawa Tengah; dan
- e) Sosialisasi hal-hal terkait penerbitan SIPI di Jawa Tengah.

Adanya upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal, sehingga kebijakan penerbitan SIPI masih berupaya agar dapat berjalan efektif.

### **B. Saran**

Untuk dapat mengefektifkan implementasi kebijakan penerbitan SIPI di Jawa Tengah, peneliti berasumsi memberikan saran, antara lain:

- 1) Pelaksana kebijakan perlu melakukan pendekatan emosional dengan cara melakukan komunikasi secara langsung untuk merubah paradigma masyarakat nelayan dan/atau pemilik kapal dalam memberikan pemahaman terkait penerbitan SIPI;
- 2) Perlu melakukan evaluasi terhadap dampak dari terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Pelaksana penerbitan SIPI di Jawa Tengah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap peran calo dalam penerbitan SIPI;
- 4) Pemerintah perlu menambah sumber daya manusia atau petugas pelaksana penerbitan SIPI di Jawa Tengah;
- 5) Pemerintah perlu menyesuaikan sumber dana yang dikeluarkan terhadap pelaksanaan penerbitan SIPI di Jawa Tengah; dan
- 6) Pemerintah perlu menyederhanakan persyaratan dan prosedur penerbitan SIPI agar nelayan dan/atau pemilik kapal tidak merasa kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zaenal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1976. *Dasar-dasar Administrasi, Management, dan Office Management*. Cetakan Keenam. Jakarta: Toko Buku Central
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Depdagri-LAN. 2007. *Modul Kebijakan Pelayanan Publik, Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Service Delivery, Accountability, and Quality Management)* hal. 30-33. Jakarta: LAN
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Impementasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moenir, H. AS (2002), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Edisi Keenam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mustafa, Delly. 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Impelementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima: Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.